

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Madura terdiri dari empat kabupaten yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan hampir memiliki kemiripan dari segala aspek, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik (Arfiyanto *et al.*, 2017). Kabupaten Sumenep menurut Dewantara *et al.*, (2019), merupakan salah satu kabupaten yang terletak di ujung bagian timur Pulau kecil Madura di Provinsi Jawa Timur yang mengembangkan pariwisata dan didukung dengan adanya potensi-potensi wisata yang saat ini sedang dikelola serta diperkenalkan ke daerah luar madura. Kabupaten Sumenep adalah kabupaten yang banyak dikelilingi oleh pulau-pulau kecil salah satunya adalah Pulau Gili labak. Pulau ini mempunyai potensi ekowisata yang besar. Sumenep merupakan kabupaten dengan pulau terbanyak di Jawa Timur, dengan jumlah 126 pulau, 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni (BPS, 2017). Kabupaten Sumenep terdiri dari 25 Kecamatan dan 331 Desa, dengan luas total Kabupaten Sumenep sebesar 212.410,2 ha. Luas Kabupaten Sumenep mempunyai kondisi terumbu karang, mangrove, dan perikanan di Jawa Timur dengan kondisi yang masih baik (Muhsoni *et al.*, 2016).

Kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia, wilayah perairan laut Indonesia dibagi menjadi 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terbentang dari wilayah Selat Malaka di sebelah barat Indonesia hingga Laut Arafura di sebelah timur Indonesia. Sumberdaya perikanan sebagai bagian kekayaan Indonesia yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan kelestarian (Budhiman *et al.*, 2011). Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang sesuai dengan permen KP nomor 18/PERMEN KP/2014 meliputi wilayah perairan laut jawa. Batas WPPNRI 712 terdiri dari Barat Lampung Timur, Utara Selat Karimata dan Kalimantan, Timur Laut Flores, serta Selatan Pulau Jawa (Thoriq *et al.*, 2015).

Metode penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan model pengelolaan adalah metode dari RAFMS (*Rapid Appraisal of Fisheries Management System*), adalah metode untuk memahami bagaimana peraturan mempengaruhi perilaku dan keluaran dengan menggunakan sumberdaya perikanan dan RAPFISH (*Rapid Appraisal for Fisheries*). RAPFISH merupakan sebuah teknik penilaian yang multidimensi untuk mengevaluasi status keberlanjutan perikanan. Sedangkan dengan pendekatan EAFM (*Ecocsystem Approach Fiheries Management*) digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik sistem pengelolaan perikanan dan menggambarkan bagaimana mereka akan mempengaruhi, baik secara positif maupun negatif dengan penggunaan sumberdaya melalui waktu (Susilowati, 2013).

Pengelolaan perikanan merupakan kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang no 31/2004 yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-undang, yaitu pada Undang-Undang no 45/2009. Dalam konteks adopsi hukum, dengan pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegritas, dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, dan pembuatan keputusan. Alokasi sumberdaya ikan, implementasi dan penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan (Budhiman *et al.*, 2012).

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat permasalahan yang perlu adanya pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, sehingga potensi lestari tetap terjaga. Salah satunya yaitu dengan menggunakan pendekatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem atau EAFM (*Ecocsystem Approach to Fisheries Management*). Mendefinisikan EAFM sebagai sebuah proses penyempurnaan pengelolaan perikanan yang dimulai dari sudut pandang Kesehatan ekosistem (*Ecosystem Health*) sebagai media peting dari proses keberlanjutan sumberdaya ikan sebagai obyek dari pengelolaan perikanan. Implementasi EAFM memerlukan perangkat indikator yang dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi mengenai sejauh mana pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (Diah *et al.*, 2018).

Ridha. (2016), menjelaskan pengelolaan sistem perikanan terdiri dari tiga bagian yaitu 1. Dimensi sumberdaya perikanan 2. Dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi 3. Dimensi kebijakan

perikanan. Pengelolaan perikanan masih belum mempertimbangkan keseimbangan ketiganya untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Dalam ungkapan Pendekatan Ekosistem untuk Pengelolaan Perikanan (EAFM) merupakan istilah yang diperkuat menuju pembangunan perikanan berkelanjutan, yang mengakui secara lebih dan saling ketergantungan antara kesejahteraan manusia dan kesejahteraan ekosistem dengan kebutuhan produktivitas ekosistem untuk generasi sekarang dan masa depan, sekaligus melestarikan habitat kritis, mengurangi polusi dan degradasi, meminimalkan limbah serta melindungi spesies yang terancam punah. Selanjutnya konsep pengelolaan terpadu yang melibatkan perencanaan dan pengatura aktivitas manusia yang menuju serangkaian tujuan interaksi yang kompleks serta bertujuan untuk meminimalkan konflik keberlanjutan dalam jangka panjang (Battersby *et al.*, 2014).

Menurut Resdiana *et al.*, (2021) adanya potensi pembangunan dan pengembangan wisata oleh Pemerintah Daerah. Selain sebagai objek pembangunan yang masuk dalam rencana induk pembangunan terdapat segitiga emas yaitu Pulau Gili Iyang, Gili Labak, dan Gili Genting yang akan menjadi sasaran untuk pengembangan wisata. Pemerintah Daerah Sumenep telah melakukan pelatihan terhadap pokdarwis di wilayah yang akan dikembangkan objek wisata, yaitu wisata segitiga emas. Dijelaskan oleh Romadhon (2010) Pulau Gili Labak sebagai Kawasan dengan potensi perikanan tangkap yang besar meskipun dalam skala yang kecil. Pentingnya hasil perikanan tangkap bagi masyarakat Pulau Gili Labak ditunjukkan dengan 90% masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status pengelolaan perikanan di Kepulauan Gili Labak Kabupaten Sumenep melalui indikator EAFM pada setiap domain-domain. Terdapat berbagai domain yaitu domain sumberdaya, alat tangkap, habitat dan ekosistem, sosial, ekonomi, serta kelembagaan (Puspasari *et al.*, 2014). Domain EAFM diperlukan dalam pengelolaan perikanan yang merupakan aturan dan rambu-rambu yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat nelayan untuk mengatur hubungan yang mengikat atau saling tergantung satu sama lain (Mayssara A *et al.*, 2014).

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui kondisi perikanan di Pulau Gili Labak pada domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, teknis penangkapan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
2. Menganalisis status pengelolaan perikanan di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep menggunakan indikator EAFM.
3. Menyusun strategi pengelolaan perikanan di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Sebagai sumber informasi mengenai status dan strategi pengelolaan perikanan di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.
2. Memperoleh data mengenai status dan kondisi perikanan tangkap di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.
3. Pengelolaan perikanan di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep dapat menjadi lebih baik.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah lokasi Pulau Gili Labak yang merupakan daerah wisata dan juga daerah penangkapan ikan. Alat tangkap yang digunakan masyarakat Pulau Gili Labak.